

Prosiding

**EKSISTENSI PERPUSTAKAAN:
Masa Silam, Era Kekinian & Masa Depan**

diterbitkan dalam rangka Seminar Nasional “Eksistensi Perpustakaan:
Masa Silam, Era Kekinian & Masa Depan”

ISI Surakarta, 27 September 2017

Penulis:

Safirotu Khoir
Chandra Pratama Setiawan
Endang Fatmawati
Aris Setiawan
Sri Wahyuni
Bakhtiyar
Nadia Amelia Qurrota A'yunin
Widyastuti
Dian Krisyanto
Tarpuah
Tri Hardiningtyas
Suharno
Ulfah Rulli Hastuti
Joko Setiyono

Editor:

Joko Setiyono
Sugeng Priyanto

UPT PERPUSTAKAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
2017

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**

**EKSISTENSI PERPUSTAKAAN: MASA SILAM,
ERA KEKINIAN & MASA DEPAN**

**Safirotu Khoir
Chandra Pratama Setiawan
Endang Fatmawati
Aris setiawan
Sri Wahyuni
Bakhtiyar
Nadia Amelia Qurrota A'yunine
Widiyastuti
Dian Kristyanto
Tarpuah
Tri Hardiningtyas
Suharno
Ulfah Rulli Hastuti
Joko Setiyono**



**Penerbit:
ISI PRESS**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

EKSISTENSI PERPUSTAKAAN: MASA SILAM, ERA KEKINIAN & MASA DEPAN

Cetakan I, 2017. ISI Press
vii+ 185 Halaman
Ukuran: 15,5 X 23 cm

All rights reserved

© 2017, Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis.

Sanksi pelanggaran pasal 72 Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diumumkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL

**EKSISTENSI PERPUSTAKAAN: MASA SILAM,
ERA KEKINIAN & MASA DEPAN**

Penulis

Safirotu Khoir
Chandra Pratama Setiawan
Endang Fatmawati
Aris setiawan
Sri Wahyuni
Bakhtiyar
Nadia Amelia Qurrota A'yunine
Widiyastuti
Dian Kristyanto
Tarpuah
Tri Hardiningtyas
Suharno
Ulfah Rulli Hastuti
Joko Setiyono

Editor

Joko Setiyono
Sugeng Priyanto

Lay out

Irvan M.

Desain sampul

Raden Lalan F.

ISBN

978-602-61933-6-0

Penerbit

ISI PRESS

Jl. Ki Hadjar Dewantara 19, Ketingan, Jebres, Surakarta 57126

Telp. (0271) 647658, Fax. (0271) 646175

EKSISTENSI PERPUSTAKAAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN SEBAGAI DAMPAK BERBAGAI PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIO KULTURAL

Bakhtiyar

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
(akhtiyar.fisipuwks@gmail.com)

Abstrak

Kajian ini bertujuan mengetahui eksistensi perpustakaan sebagai dampak perubahan kurikulum nasional. Kajian ini menggunakan *library research*. Analisa diskriptif kualitatif dan sumber analisa berasal dari kajian bahan-bahan pustaka teoritis, penelitian dan kajian bukan penelitian, serta menggunakan *content analysis*. Hasil kajian adalah; 1). Perubahan kurikulum selalu berdampak pada eksistensi perpustakaan yang semakin diapresiasi keberadaannya. 2). Kurikulum tahun 2013 mengacu pelaksanaan pembelajaran berbasis perpustakaan. Perpustakaan sebagai pusat belajar, merupakan posisi strategis dalam keberlangsungan pembelajaran. 3). Berbagai perubahan kurikulum, menunjukkan eksistensi perpustakaan semakin diapresiasi keberadaannya, citra perpustakaan semakin positif. Di masa mendatang, perpustakaan memiliki posisi dan peran yang sangat strategis, menjadi : (1) pusat rekreasi intelektual, (2) Pusat internalisasi nilai moralitas dan kesantunan bangsa, (3) pusat pembentukan watak dan kepribadian bangsa, (4) pusat sumber belajar, (5) pusat ilmu pengetahuan, (6) pusat pengembangan berpikir kritis dan analitis, (7) laboratorium pembelajaran, (8) pusat sumber informasi, (9) pusat inovasi, (10) pusat pembentukan SDM berkualitas, handal dan profesional.

Kata kunci : Eksistensi perpustakaan, Perubahan kurikulum

PENDAHULUAN

Perubahan taraf hidup manusia ke arah yang lebih baik hanya dapat diraih dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan yang berkualitas.

“Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. (Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1)

Sebagaimana pendapat Robert Dreeben yang menyatakan, bahwa anak belajar di sekolah untuk membaca dan menulis, berhitung serta belajar aturan kemandirian, cara berprestasi, universalisme, dan spesifitas. (Kamanto Sunarto, 1993: 31). Koentjaraningrat, menyatakan bahwa kepribadian terbentuk karena terdapat stimulus rangsangan dan pengaruh nilai dan norma masyarakat yang terpola dalam sistem budaya, dan terdapat pola perilaku dalam sistem sosial, melalui sosialisasi yang lama, dan proses pemberdayaan serta internalisasi sejak anak masih kecil (Koentjaraningrat, 2003: 95).

Guna mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, maka pemerintah memberlakukan perubahan-perubahan kurikulum, mulai Kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, Kurikulum 2013, terkini bernama KKNi masih ramai diperbincangkan. Perubahan kurikulum pasti memiliki dampak berskala luas dalam sistem pendidikan. Tak ayal lagi, perpustakaan sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan juga mengalami berbagai perubahan dan pergeseran.

Berdasarkan uraian yang telah terpaparkan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi pokok bahasan dan ingin diketahui adalah tentang eksistensi perpustakaan dalam sistem pendidikan nasional sebagai implikasi berbagai perubahan kurikulum pendidikan nasional. Sangat perlu membatasi ruang lingkup kajian ini dengan menggunakan sudut pandang perspektif sosio kultural.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pendidikan

Pranata pendidikan adalah pengasuhan anak, pendidikan dengan melalui berbagai jenjang pendidikan, pemberantasan buta aksara, pers, perpustakaan umum, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat pranata yang dinamakan dengan pranata ilmiah. Adapun

pranata ilmiah meliputi antara lain metodologi ilmiah, penelitian, dan pendidikan (Koentjaraningrat, 2003: 135)

Pendidikan menurut pendapat Save M. Dagun (2006: 813) merupakan proses membina dan mengarahkan manusia terlepas dari kegelapan dan kebodohan menuju kecerahan pengetahuan. Pendidikan formal maupun informal, dapat memperkaya pengetahuan manusia, tentang dirinya dan tempat lingkungannya. Menurut caranya, pendidikan dibagi tiga macam: a) Dresur, pendidikan wajib yang dilakukan pada anak-anak yang umurnya belum satu tahun, b) Latihan, pendidikan pembentuk kebiasaan yang dilakukan sedapat-dapatnya secara sadar oleh anak didik, c) Pendidikan, proses belajar mengajar yang bertujuan membentuk kata hati, anak didik dibiarkan berbuat menurut kesanggupan sendiri dan berperilaku atas tanggung jawab sendiri pula.

Kajian utama dalam sosiologi bertumpu pada institusi pendidikan formal dalam masyarakat. Adapun institusi pendidikan formal adalah sekolah yang memberikan pendidikan secara formal, yang mempunyai jenjang dari PAUD sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik bersifat umum seperti sekolah agama maupun khusus yaitu sekolah luar biasa (Kamanto Sunarto, 1993: 163).

2. Kurikulum

Kurikulum merupakan jalan penghubung sangat penting, untuk mencapai tujuan akhir dari belajar dan berciri khas yaitu memperoleh ijazah. Di Indonesia istilah “kurikulum” menjadi populer pada tahun lima puluhan. Dipopulerkan oleh mereka yang lulus pendidikan dari Amerika Serikat. Sebelumnya yang lazim digunakan adalah “rencana pelajaran”. Hakikatnya kurikulum adalah sama dengan rencana pelajaran (Nasution, 2005: 52). Kurikulum adalah seperangkat rencana untuk pengaturan tentang isi dan materi pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk meraih capaian pembelajaran tertentu. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Kurikulum dikembangkan dengan mengacu standar nasional pendidikan. Guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka kurikulum diharapkan menjadi landasan, isi dan pedoman bagi pengembangan kemampuan peserta didik secara optimal, sesuai dengan perkembangan masyarakat. (UU Nomor 20 tahun 2003 Bab X tentang kurikulum pasal 36 ayat 1).

Pengembangan kurikulum terikat oleh hukum, sehingga arah pengembangannya sangat jelas sesuai dengan prinsip yang disepakati (Komariyah, 2005: 23-25). Setiap pengembangan kurikulum selalu berprinsip sebagai berikut: (1) Prinsip Relevansi, merupakan kesesuaian antara komponen tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Ada dua macam relevansi yaitu: (a). Relevansi keluar yaitu tujuan, isi dan proses belajar, termuat dalam kurikulum seyogjanya relevan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. (b) relevansi di dalam yaitu kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian dan penilaian. (2) Prinsip Fleksibilitas, merupakan kebebasan/keluwesannya yang dimiliki seorang guru, dalam mengimplementasikan kurikulum. Terdapat alternatif program pendidikan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakat. (3) Prinsip Kontinuitas, terdapat kesinambungan materi pelajaran, antar tingkatan kelas dan berbagai jenis dan jenjang sekolah. Proses belajar berlangsung secara berkesinambungan, bertahap dan tidak terputus-putus. (4) Prinsip Praktis dan Efisiensi, berkenaan kurikulum harus dapat dan mudah diimplementasikan, alat-alat yang dipakai sederhana dan biayanya juga murah. Pelaksanaannya menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. (5) Prinsip Efektifitas, keberhasilan pelaksanaan kurikulum, secara kuantitas maupun kualitas harus diperhatikan. Keberhasilan kuantitas meliputi komponen-komponen kurikulum, seperti tujuan, isi, proses belajar, dan evaluasi. Sedangkan keberhasilan secara kualitas ditinjau dari hasil pelaksanaan kurikulum yang ada. (6) Prinsip khusus, pengembangan kurikulum, antara lain: prinsip agama, nilai dan budi pekerti luhur, bahasa, penguasaan integrasi nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika, kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan hidup, berpusat pada anak, serta pendekatan menyeluruh dan kemitraan.

3. Pustakawan

Pustakawan adalah seorang ahli perpustakaan, dapat menelusur dan menemukan koleksi perpustakaan dan informasi yang dibutuhkan pemustaka, serta ahli manajemen dokumen ataupun laporan, memberikan layanan informasi, penyediaan komputer dan pelatihan, koordinasi program publik, peralatan bantu bagi para penyandang cacat, dan membantu dengan mencari dan menggunakan

sumber daya masyarakat. Pustakawan ialah orang yang melaksanakan aktivitas kerja memberikan jasa informasi dalam layanan kepada pemustaka berdasarkan visi dan misi lembaga induknya (Sulistiyo Basuki, 1993: 8). Dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dijelaskan pustakawan adalah seseorang mempunyai kompetensi diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan manajemen perpustakaan.

4. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang keberadaannya merupakan bagian integral dari lembaga pendidikan sekolah dan merupakan sumber belajar guna mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan sekolah. (PNRI, 2000, hlm. 3).

Sedangkan Darmono (2007) menyatakan bahwa perpustakaan sekolah merupakan sarana pendidikan, sebagai penunjang proses pembelajaran siswa, mempunyai peran penting memacu terwujudnya tujuan pendidikan disekolah. Nurhadi dalam (B. Suryosubroto, 1997, hlm. 205) juga memberikan pengertian perpustakaan sekolah, adalah unit kerja di lembaga pendidikan sekolah menyimpan koleksi bahan pustaka yang dikelola, disusun secara sistematis dengan cara tertentu dan dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk mendukung aktivitas belajar mengajar di sekolah.

METODE KAJIAN

Obyek, Ruang Lingkup dan Fokus Kajian.

Obyek kajian bertumpu pada *content* eksistensi perpustakaan dalam berbagai perubahan kurikulum pendidikan nasional. Ruang lingkup kajian berfokus pada perwujudan reposisi dan eksistensi perpustakaan sebagai dampak perubahan kurikulum pendidikan nasional.

Pendekatan, Metode dan Analisis Kajian

Secara metodologis kajian ini menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), yang merupakan suatu analisis-pemikiran kritis dan realitis. Kajian sejarah memiliki ciri yang dominan

yaitu merupakan penyelidikan kritis dengan menggunakan data primer yang dianggap sebagai sumber informasi primer. Metode kajian yang digunakan dalam pencarian data adalah kajian perpustakaan atau studi pustaka (*library research*) dengan membaca berbagai literatur. Analisis kajian dilakukan dengan menggunakan analisa diskriptif kualitatif. Adapun sumber analisa berasal dari kajian bahan-bahan pustaka yang berisi teoritis, penelitian dan kajian bukan penelitian. Di samping itu, juga dilakukan analisis isi (*content analysis*). Analisa isi dimaksudkan untuk melakukan analisa terhadap makna yang terkandung dalam keseluruhan konsep eksistensi perpustakaan dan implikasi perubahan kurikulum pendidikan nasional serta aplikasinya dalam dunia kerja di perpustakaan. Observasi atau pengamatan sehari-hari di perpustakaan digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung konstruksi teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perpustakaan sebagai Komponen Penting dalam Akreditasi

Sarana wajib yang harus disediakan dan dikembangkan oleh sekolah adalah adanya keberadaan perpustakaan. Akreditasi sekolah untuk semua jenjang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim, wajib mengacu pada Keputusan tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah dan Madrasah (Majalah Bulanan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, 2007: 5). Dalam akreditasi sekolah terdapat sembilan komponen penilaian akreditasi. Perpustakaan sebagai kelengkapan sarana dan prasarana juga menjadi komponen penilaian yang penting bagi akreditasi sekolah.

2. Eksistensi Perpustakaan pada Pelaksanaan Kurikulum KBK

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan seperangkat kurikulum, muatannya mendorong siswa trampil untuk menggunakan “pemikiran pribadi”. Didalam setiap KBM, siswa diajak untuk dapat memecahkan masalah sehari-hari yang dihadapinya, baik didalam maupun diluar kelas sehingga dapat menemukan dan menentukan serta untuk mengambil solusi yang terbaik. Kristalisasi

semua kompetensi dasar dari semua mata pelajaran itu bermuara pada “ketrampilan berfikir” (*Thinking Skill*).

Perpustakaan harus dikemas sedemikian rupa agar tampil menarik, yang pada akhirnya mampu menarik minat pemustaka untuk memanfaatkan perpustakaan secara optimal. Agar koleksi perpustakaan membawa manfaat secara optimal, efektif dan efisien, maka dalam setiap pengadaannya pustakawan juga mempertimbangkan berbagai saran dan masukan dari guru serta pengguna jasa layanan informasi. Bentuk atau model pembelajarannya, siswa dan guru dituntut untuk lebih banyak membaca referensi secara mandiri dan juga aktif dalam menerapkan teori tersebut. Konsekuensinya, keterlibatan perpustakaan dalam proses pembelajaran tak dapat disangkal dan dielakan lagi.

Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun. 2003 pasal 35 yang berbunyi: (Mulyasa, 2002: 30)

“Pendidikan tidak mungkin dapat terselenggara dengan baik bilamana para tenaga kependidikan maupun para peserta didik tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan untuk menyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang bersangkutan. Salah satu sumber belajar yang amat penting, tapi bukan satu-satunya adalah perpustakaan yang harus memungkinkan tenaga kependidikan dan para pendidik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan.”

3. Eksistensi Perpustakaan pada Pelaksanaa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum tahun 2006, yang akan resmi diberlakukan mulai tahun pelajaran 2007/2008. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jatim, Dr. H. Rasiyo, M.Si menyatakan bahwa, hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 dan 23 tentang Standar Isi dan Proses, sedangkan Nomor 24 tentang Tindak Lanjut Nomor 22 dan 23. Standar isi memuat: Kerangka Dasar, Struktur Kurikulum, Beban Belajar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan Kalender Pendidikan. Yang dimaksud

struktur yaitu mata pelajaran sesuai dengan kelompok mata pelajaran yang diberikan berdasar kurikulum 2006. Adapun 5 kelompok mata pelajaran yang dimaksud adalah: (Media: Majalah Bulanan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, 2007: 4)

- a. Kelompok Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia.
- b. Kelompok Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian.
- c. Kelompok Pelajaran Estetika.
- d. Kelompok Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
- e. Kelompok Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Setiap perubahan pasti membawa implikasi / dampak, termasuk perubahan sstem pendidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Yasin dalam sebuah artikelnya yang berjudul “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) antara kekhawatiran dan harapan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan”. (Majalah Bulanan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, 2007: 8). Sukmadinata (2004: 268) menyatakan bahwa sebagai sorang pengajar guru lebih berperan dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pelatih berperanan membantu pengembangan ketrampilan, mengembangkan segi-segi afektif, sikap, nilai-nilai, motivator dan lain-lain. Fokus yang menjadi inti utama, dalam proses pendidikan adalah adanya intraksi antara guru dengan siswa. Proses pengajaran dapat berlangsung secara klasikal, kelompok maupun individu, langsung atau tidak langsung, menggunakan media atau tanpa media pendidikan. Kecakapan dan ketrampilan guru dalam menyampaikan dan menerima informasi, mengaplikasikan pengetahuan, memberikan motivasi belajar dan memberikan kritik pada siswa, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses dan hasil pembelajaran.

Sebagai sumber belajar, penyelenggaraan perpustakaan sesungguhnya untuk mendukung dan memfasilitasi dilaksanakannya proses pendidikan berjalan secara optimal. Sebagaimana menurut pendapat Bafadal (2005: 1-6), perpustakaan merupakan unit kerja dari lembaga tertentu, mengelola koleksi dan diatur sistimatis sesuai aturan tertentu sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi oleh pemustaka.

4. Pembelajaran Berbasis Perpustakaan adalah Solusi Terbaik sebagai Jawaban terhadap Implikasi Penerapan Kurikulum Tahun 2013

Kurikulum tahun 2013, melanjutkan dan penyempurnaan kurikulum KTSP. Dalam kurikulum 2013, masih dijumpai kelemahan sebagaimana diungkapkan oleh Mulyasa (2013: 60). Setelah melalui perbincangan dan perdebatan, maka dilakukan revisi kurikulum 2013. Ada 5 poin perubahan yang dilakukan menurut Ainamulya (2016) yaitu: (1). Meningkatkan keterkaitan antara kompetensi inti (KI) dengan Kompetensi dasar (KD). (2). Penilaian aspek sosial dan agama, hanya dilakukan pendidik PPKn dan pendidikan agama/budi pekerti. Para pendidik bidang studi menilai aspek sosial yang wajar, misalnya aspek kejujuran dalam mengerjakan soal ujian. (3). Proses berpikir siswa tidak dibatasi, artinya perubahan pandangan, di mana pada kurikulum 2013 yang lama siswa SD dibatasi proses berpikirnya dibatasi hanya sampai tahapan memahami. Siswa SMP proses berpikirnya dibatasi sampai menganalisis. Siswa SMA proses berpikirnya dibatasi sampai mencipta. Pada Kurikulum 2013 yang baru, siswa SD diberikan kebebasan sampai tahap penciptaan, yang disesuaikan dengan usia anak SD. (4). Guru dituntut untuk menerapkan 5 M (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa dan mencipta) (5) Struktur mata pelajaran dan lama tatap muka tidak mengalami perubahan.

Dalam rangka mengembangkan daya kognisi, afeksi, dan psikomotorik peserta didik dari strata manapun, sangat perlu pengembangan proses belajar mengajar berbasis perpustakaan. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar berbasis pemanfaatan jasa layanan perpustakaan, menurut Achmad Priyatmojo dkk (2005) langkah-langkah yang perlu di perhatikan oleh guru antara lain: 1). Membuat dan memberikan tugas yang relevan dengan mata pelajaran yang di ajarkan pada siswa. 2). Memastikan bahwa perpustakaan telah memiliki informasi yang diperlukan. Tugas yang diberikan kepada siswa harus disesuaikan dengan fasilitas dan informasi yang tersedia di perpustakaan. 3). Ajarkan strategi riset dengan memberikan daftar langkah-langkah atau prosedur yang wajib dikerjakan oleh siswa, untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya dengan memanfaatkan layanan jasa informasi di perpustakaan. 4). Hindarkan suasana gaduh, sebab pada umumnya sejumlah siswa dalam mencari sebuah bahan,

artikel, indeks atau informasi yang sama, biasanya menciptakan atau menimbulkan suasana gaduh. Situasi dan kondisi tersebut dapat mendorong siswa melakukan mutilasi pada buku atau sumber bacaan yang lain.

5. Eksistensi Perpustakaan di Masa Mendatang

Menurut Sutamo NS (2005), diselenggarakannya perpustakaan sekolah tidak sekedar hanya menyimpan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tetapi keberadaan perpustakaan sekolah sangat dibutuhkan untuk membantu peserta didik dan pendidik, guna penyelesaian tugas-tugas pendidikan. Sebagai konsekwensi logisnya, koleksi bahan pustaka milik perpustakaan sekolah, harus mampu mendukung aktivitas pendidikan di sekolah. Penambahan koleksi bahan pustaka harus selalu mempertimbangkan perkembangan kurikulum, minat dan selera para siswa. Sedangkan menurut Darmono (2007) perpustakaan merupakan sarana yang sangat dibutuhkan diberbagai lingkungan instansi, termasuk lingkungan sekolah guna suksesnya setiap upaya pembelajaran. Perpustakaan sekolah bertujuan, mengumpulkan dan mengelola informasi, serta mewujudkan suatu wadah pengetahuan yang terorganisir dengan baik, memungkinkan menikmati imajinatif dan membantu perkembangan siswa dalam memanfaatkan bahan pustaka serta memberikan dasar-dasar studi mandiri.

Peran perpustakaan semakin strategis dan menjadi kunci utama dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Pada era kekinian dan masa mendatang, eksistensi perpustakaan akan selalu meningkat citranya dan semakin diapresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Perpustakaan di masa mendatang semakin memegang posisi strategis dan memiliki peranan aktif dan dominan sebagai berikut :

1. Perpustakaan sebagai pusat rekreasi intelektual/tamasya intelektual.
2. Perpustakaan sebagai pusat internalisasi nilai-nilai moral dan norma kesantunan bangsa.
3. Perpustakaan sebagai pusat pembentukan watak dan kepribadian bangsa.
4. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar.
5. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan.
6. Perpustakaan sekolah sebagai pusat pengembangan berpikir kritis dan analitis.

7. Perpustakaan sekolah sebagai laboratorium pembelajaran untuk memiliki pendekatan ilmiah (*scientific approach*).
8. Perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber informasi.
9. Perpustakaan sebagai pusat inovasi.
10. Perpustakaan sebagai pusat pembentukan SDM berkualitas, handal dan profesional

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Setiap sistem kurikulum yang diaplikasikan selalu memiliki dampak terhadap eksistensi perpustakaan dalam sistem pendidikan. Perpustakaan semakin tangguh dan semakin kokoh memiliki posisi dan peranan yang strategis dalam sistem pendidikan nasional.
2. Alternatif terbaik dalam kurikulum tahun 2013 adalah mengarah pada pelaksanaan proses belajar mengajar dengan berbasis perpustakaan.
3. Eksistensi perpustakaan semakin diapresiasi dan semakin positif citranya dalam masyarakat. Eksistensi Perpustakaan di era kini dan di masa mendatang, semakin memiliki posisi dan peran yang strategis dalam sistem pendidikan nasional yaitu menjadi : (1) perpustakaan sebagai pusat rekreasi intelektual/tamasya intelektual, (2) perpustakaan sebagai pusat internalisasi nilai-nilai moral dan norma kesantunan bangsa, (3) Perpustakaan sebagai pusat pembentukan watak dan kepribadian bangsa. (4) perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, (5) perpustakaan sebagai pusat pembentukan watak dan kepribadian bangsa, (6) perpustakaan sekolah sebagai pusat pengembangan berpikir kritis dan analitis, (7) perpustakaan sekolah sebagai laboratorium pembelajaran untuk memiliki pendekatan ilmiah, (8) perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber informasi, (9) perpustakaan sebagai pusat inovasi (10) perpustakaan sebagai pusat pembentukan SDM berkualitas, handal dan profesional.

Saran

1. Guru juga harus bekerjasama secara sinergis dengan pustakawan dan petugas perpustakaan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis pemanfaatan layanan jasa informasi perpustakaan.

2. Profesionalitas pustakawan senantiasa untuk ditingkatkan dalam kinerjanya di perpustakaan. Pustakawan diharapkan untuk berperan lebih aktif, inovatif, kreatif dan selalu visioner, dalam melakukan dan menata berbagai aktivitas pengumpulan, penghimpunan dan pengadaan, pengolahan, pelayanan serta penyebarluasan informasi pada pemustaka.
3. Pustakawan wajib mengembangkan kemampuan komunikasi, untuk dapat berinteraksi secara aktif dan membangun relasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga dapat memperoleh dukungan yang luas terhadap pembelajaran berbasis perpustakaan, yang pada akhirnya menghasilkan terciptanya peningkatan dan penguatan reputasi pustakawan dan eksistensi perpustakaan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ainamulyana. (2016). *5 Poin Penting Hasil Revisi. Artikel*. Retrieved From <http://ainamulyana.blogspot.co.id/2016/03/berikut-ini-5-poin-penting-hasil-revisi.html>
- Bafadal, Ibrahim. (2005). *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Basuki, Sulistyono. (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia.
- Dagun, Save M. (2006). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara
- Darmono. (2007). *Perpustakaan Sekolah: Manajemen dan Tata Kerja*. Jakarta: Grasindo Indonesia.
- Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2000). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah dan Madrasah.
- Koentjaraningrat. (2003). *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komariyah. (2005). *Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif*. Bandung: Bumi Aksara.
- Kusminarto, Priyatmojo Achmadi,dkk. (2005). *Perpustakaan Dalam Proses Pembelajaran*. Jogyakarta: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Gajah Mada.
- Majalah Bulanan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. (April: 2007) Surabaya: Media.
- Mulyasa, E. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: knsep, karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Rosda Karya.
- Mulyasa, H.E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2005). *Azas-Azas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sukmadinata, Nana Saodi. (2004). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sunarto, Kamanto. (1993). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suryosubroto, B. (1997). *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarno, N.S. (2005). *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Sanitra Media Utama.